

## **Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia**

Seminar Nasional

### **“Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat”**

*Jakarta, 18 Desember 2017*

---

#### **Yang kami hormati:**

1. Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, **Bapak Tubagus Achmad Choesni**
2. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, **Bapak Ahmad M. Ramli**
3. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, **Bapak Andi Zainal A. Dulung**
4. Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, **Bapak Gatot Trihargo**
5. Sekretaris Eksekutif, TNP2K, **Bapak Bambang Widianto**  
**(Daftar selanjutnya optional, dapat tidak disebutkan nama, cukup institusinya)**
6. Pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan
  - a. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Ibu Sondang Martha Samosir
  - b. Analis Eksekutif Senior Group Strategic Committee dan Pusat Riset, Ibu Ida Rumondang
7. Pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Asisten Deputy Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapak A. Heri Susanto
8. Pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Ibu Vivi Yulaswati
9. Pejabat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Bapak Pelopor
10. Pejabat dari Kementerian Keuangan: Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal: Ibu Ayu Sukorini

11. Pejabat dari Bank Indonesia

a. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Ibu Eni V. Panggabean

b. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bapak Pungky P. Wibowo

dan Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

***Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,***

**[Pembukaan]**

1. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan perkenan-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh kebahagiaan.
2. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama mengikuti Seminar Nasional dengan tema "**Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat**". Pemilihan tema yang menurut hemat kami sangatlah penting, mengingat perluasan akses keuangan masyarakat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini, antara lain dikarenakan besarnya jumlah penduduk Indonesia, serta luasnya wilayah dan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 16 ribu pulau.
3. Kami atas nama Bank Indonesia, yang pada hari ini bekerja sama dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai dalam menyelenggarakan seminar nasional ini, **menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan panelis dari Kementerian dan Lembaga**, karena telah bersedia hadir untuk berbagai informasi dan pengalaman terkait perluasan akses keuangan masyarakat dalam payung besar Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dengan bantuan sosial sebagai salah satu strategi utamanya.
4. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh stakeholder terkait dapat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, sehingga dapat bergerak secara terpadu untuk **menyukseskan tercapainya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan**

**Inklusif, yaitu 75% penduduk di Indonesia telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal.**

### **[Strategi Nasional Keuangan Inklusif]**

**Bapak/Ibu Hadirin yang Kami Hormati,**

5. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi akses keuangan di Indonesia masih kurang menggembirakan. Hal itu tercermin dari **rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, yang berdasarkan survey terakhir Bank Dunia pada tahun 2014 hanya sebesar 36%**. Artinya, hanya 36% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.
6. Rendahnya tingkat inklusi keuangan tersebut dapat berakibat negatif pada berbagai aspek.
  - a. **Dari sisi masyarakat**, eksklusivitas keuangan berdampak pada tidak adanya budaya menabung sehingga masyarakat tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga ataupun keperluan di masa depan. Selain itu, eksklusivitas keuangan juga dapat menutup peluang masyarakat untuk memupuk asset, sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, serta menyebabkan inefisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran.
  - b. **Dari sisi stabilitas sistem keuangan**, eksklusivitas keuangan dapat menghambat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sehingga berakibat pada kurang optimalnya fungsi intermediasi dari lembaga keuangan. Tidak hanya itu, eksklusivitas keuangan juga dapat memperbesar *shadow economy* atau transaksi ekonomi yang tidak tercatat sehingga rawan menimbulkan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengurangi *'buffer'* bagi sistem keuangan apabila terjadi kondisi resesi.
  - c. Akhirnya, **bagi perekonomian nasional**, eksklusivitas keuangan dapat memperlebar kesenjangan sosial, tidak mendukung penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan inefisiensi secara nasional.
7. Memperhatikan dampak negatif yang dapat terjadi, kebutuhan akan perluasan akses keuangan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2016 yang lalu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

telah menerbitkan **Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).**

8. Perpres dimaksud diterbitkan untuk memperkuat komitmen para pihak dalam mewujudkan perluasan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat *unbanked*. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, target utama yang ingin dicapai melalui Perpres dimaksud adalah **kenaikan tingkat inklusi keuangan menjadi 75% pada tahun 2019.**
9. Dalam mencapai target tersebut, dapat kami sampaikan secara umum bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah menetapkan 5 Pilar, yaitu (i) **Edukasi Keuangan pada Pilar Pertama**, (ii) **Hak Properti Masyarakat pada Pilar Kedua**, (iii) **Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan pada Pilar Ketiga**, (iv) **Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah pada Pilar Keempat**, dan (v) **Perlindungan Konsumen pada Pilar Kelima.**
10. Kelima pilar tersebut **ditopang oleh tiga pondasi dasar**, yaitu (i) Kebijakan dan Regulasi yang Kondusif, (ii) Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan yang Mendukung, serta (iii) Organisasi dan Mekanisme Implementasi yang Efektif.
11. Di dalam masing-masing pilar dan pondasi yang kami sebutkan tersebut, terdapat berbagai strategi dan program yang akan dilakukan berbagai Kementerian dan Lembaga. Strategi dan program itulah yang perlu kita ketahui dan pahami bersama, sehingga masing-masing dapat berkontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
12. Kami tidak akan menjelaskan masing-masing program dan strategi yang ada pada pilar dan pondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, karena tentu nanti akan dielaborasi oleh narasumber dan panelis yang telah hadir dan siap membagikan ilmunya pada kita semua pagi hari ini.

### **[Bantuan Sosial Non Tunai]**

**Bapak/Ibu Hadirin yang Berbahagia,**

13. Seminar nasional pada hari ini juga akan mendiskusikan **lebih dalam mengenai transformasi penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagai upaya akselerasi perluasan akses keuangan.**

14. Akselerasi perluasan akses keuangan melalui bantuan sosial secara non tunai dianggap sebagai langkah yang berdampak besar, mengingat **jumlah penerima program bantuan sosial dan subsidi sangatlah besar, yaitu hampir mencapai angka 30 juta keluarga di seluruh Indonesia.**
15. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada Triwulan III 2017 lalu mencatat angka 5,06%, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di kelas bawah atau *bottom of the pyramid*.
16. Tentu saja, transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan efektif, serta **mendukung pencapaian prinsip 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.**
17. Dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah dimulai sejak satu tahun yang lalu. Diawali dari penyaluran sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai pada tahun 2016 kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan selanjutnya pada tahun 2017 diperluas targetnya kepada 6 juta KPM serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM. Ke depan program bansos non tunai **akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai 10 juta penerima**, masing-masing untuk PKH dan BPNT.
18. Sebagai payung hukum penyaluran bantuan sosial secara non tunai, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun ini **telah menerbitkan Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Non Tunai.**
19. Penerbitan Perpres tersebut dimaksudkan untuk **memberikan pedoman yang jelas dan menjaga standarisasi mekanisme penyaluran secara non tunai berbagai program bansos.** Sehingga, dalam hal pada perkembangan ke depan terdapat berbagai bantuan sosial yang akan disalurkan secara non tunai, maka standarisasi mekanisme dapat mengacu pada Perpres dimaksud dan melihat implementasi bansos non tunai yang sudah lebih dahulu diimplementasikan.

## [Peran Bank Indonesia]

**Bapak/Ibu Hadirin sekalian,**

20. Dalam mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, termasuk penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagai salah satu inisiatif utama, **Bank Indonesia telah berkomitmen penuh dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan program dimaksud.**
21. Dukungan Bank Indonesia diwujudkan dalam **Blueprint Sistem Pembayaran yang terdiri dari tiga pilar utama**, yaitu: (i) perluasan penggunaan instrumen non tunai (elektronifikasi), (ii) infrastruktur pembayaran yang andal dan aman, dan (iii) pengawasan serta oversight yang kuat dan tajam serta menyeluruh (rigorous).
22. Seluruh **program dan inisiatif terkait keuangan inklusif termasuk bansos non tunai diimplementasikan di bawah pilar pertama, yaitu elektronifikasi.** Dalam pelaksanaan inisiatif pilar pertama tersebut, **dukungan infrastruktur yang antara lain berupa implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada pilar kedua akan berkontribusi penuh bagi interoperabilitas dan interkoneksi penyaluran bantuan sosial non tunai** guna memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran.
23. Selanjutnya, agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, **pengawasan yang kuat dan menyeluruh, sebagaimana pilar ketiga Blueprint Sistem Pembayaran, akan dilakukan Bank Indonesia pada seluruh tahapan dan fase penyaluran bantuan sosial non tunai.**
24. Tidak hanya itu, mengingat pelaksanaan program inklusi keuangan dan penyaluran bantuan sosial non tunai diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia, Bank Indonesia juga **berkomitmen penuh untuk melakukan proses monitoring dan pemantauan penyaluran bantuan sosial non tunai, melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota,** yang pada kesempatan hari ini turut hadir untuk mengikuti dan memahami program keuangan inklusif dan penyaluran bantuan sosial non tunai.

**<Penutup>**

**Bapak/Ibu Hadirin yang Kami Hormati,**

25. Kiranya kami tidak akan menggunakan waktu lebih lama lagi untuk menyampaikan sambutan pembuka pada hari ini. Hal-hal utama yang kami sebutkan tadi akan disampaikan secara lebih detail pada sesi materi yang akan dibawakan pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait.
26. Akhir kata, guna menyukseskan upaya perluasan akses keuangan, termasuk melalui penyaluran bantuan sosial non tunai sebagai salah satu strategi utama, kami berharap seluruh pihak yang hadir pada hari ini **dapat memberikan masukan yang konstruktif dan mendukung secara penuh program-program untuk meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia**. Melalui kesamaan pandangan, kerja sama dan koordinasi yang erat, serta komitmen bersama antara **Kementerian dan Lembaga terkait, pelaku industri, dan masyarakat**, kami meyakini program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga perekonomian Indonesia secara nasional.
27. Demikian sambutan kami. Dengan ini kami nyatakan Seminar Nasional **“Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat”** dibuka.

***Terima kasih***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Jakarta, 18 Desember 2017

**Dr. Sugeng**

**Deputi Gubernur Bank Indonesia**